

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI KLAS II BANGIL</b>          Jalan DR. Soetomo No.25 Bangil 67153          Telp./Fax. (0343) 741012          Website: www.pn-bangil.go.id          Email: pnbangil@yahoo.co.id</p>	<b>Nomor S.O.P.</b>	W14-U21/PMPN.SOP.HK.09
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	2 Januari 2015
	<b>Tanggal Revisi</b>	25 Juli 2016
	<b>Tanggal Efektif</b>	25 Juli 2016
	<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bangil
<b>09. S.O.P. KERJASAMA POS BANTUAN HUKUM</b>		

<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;</li> <li>3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.</li> <li>4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.</li> <li>6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya</li> <li>7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan</li> <li>9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li> <li>11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah</li> <li>12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</li> <li>13. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Peraturan Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2014</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1 – Hukum</li> <li>2. SLTA</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S.O.P. Pengelolaan kepaniteraan pidana</li> <li>2. S.O.P. Pengelolaan kepaniteraan perdata</li> </ol>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop / Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Buku agenda</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <p>Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan posbakum terhenti</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p>Surat kerjasama</p>



**PENGADILAN NEGERI KLAS II BANGIL**  
 Jalan DR. Soetomo No.25 Bangil 67153  
 Telp./Fax. (0343) 741012  
 Website: www.pn-bangil.go.id  
 Email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor S.O.P.	W14-U21/PMPN.SOP.HK.09
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2015
Tanggal Revisi	25 Juli 2016
Tanggal Efektif	25 Juli 2016
Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bangil

**09. S.O.P. KERJASAMA POS BANTUAN HUKUM**

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf hukum	Panmud Hukum	Panitera	Ketua	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat masuk permohonan kerja sama dari lembaga bantuan hukum					Sudah mendapat verifikasi /Akreditasi dari Menteri Hukum dan HAM RI	2X24 Jam	Surat permohonan kerja sama	
2	Membuat dan mengetik perjanjian permohonan kerja sama					Sudah mendapat verifikasi /Akreditasi dari Menteri Hukum dan HAM RI		Surat permohonan kerja sama	
3	Meneliti perjanjian kerjasama					Pejanjian kerja sama dan kelengkapan berkas yang diperlukan		Surat perjanjian kerja sama	
4	Penanda tanganan perjanjian kerjasama dengan para penyedia layanan					Surat perjanjian kerja sama dan pihak penyedia POS BAKUM		Surat perjanjian kerja sama	
5	Pengarsipan perjanjian kerjasama Pos Bantuan Hukum					Surat perjanjian kerja sama		Surat perjanjian kerja sama	

 <p><b>PENGADILAN NEGERI KLAS II BANGIL</b>          Jalan DR. Soetomo No.25 Bangil 67153          Telp./Fax. (0343) 741012          Website: www.pn-bangil.go.id          Email: pnbangil@yahoo.co.id</p>	<b>Nomor S.O.P.</b>	W14-U21/PMPN.SOP.HK.09
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	2 Januari 2015
	<b>Tanggal Revisi</b>	25 Juli 2016
	<b>Tanggal Efektif</b>	25 Juli 2016
	<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bangil
<b>09. S.O.P. KERJASAMA POS BANTUAN HUKUM</b>		

### HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1	Memakai Logo TAPM	Memakai Logo Pengadilan Negeri Bangil	25 Juli 2016
2	Lembar Pengesahan jadi satu di dalam S.O.P	Lembar Pengesahan tersendiri	25 Juli 2016
3	Penomoran menggunakan kode TAPM	Penomoran menggunakan kode PMPN	25 Juli 2016